



ANALISIS POTENSI EKONOMI PERTAHANAN PADA INFRASTRUKTUR BANDARA DAN PELABUHAN DI KEPULAUAN RIAU

Diky Budiman¹⁾, Heru Prasetyo²⁾, Mey Krisselni Sitompul³⁾

¹⁾ Prodi Bisnis Digital, Politeknik Internasional Bali

²⁾ Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

³⁾ Prodi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Karimun

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi ekonomi pertahanan pada infrastruktur bandara dan Pelabuhan di Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan library research. Hasil yang diperoleh menunjukkan fasilitas infrastruktur bandara dan pelabuhan yang memadai, akan meningkatkan perekonomian daerah serta dapat dimanfaatkan dalam pertahanan negara. Infrastruktur bandara diantaranya dapat membantu daerah kepulauan dalam pengiriman pasokan barang untuk daerah yang sulit dijangkau sehingga akan menekan harga barang dan dapat digunakan sebagai landasan untuk mendaratnya pesawat militer pada kondisi darurat. Sedangkan infrastruktur pelabuhan yang baik, dapat menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan, yang menjadi bentuk penjangkauan bagi wilayah perairan nasional dan juga kapal asing yang bersandar karena aktivitas perdagangan internasional, pelabuhan juga menjadi penyaring pertama atas barang-barang yang masuk ke negara Indonesia. Oleh sebab itu, infrastruktur pelabuhan dan bandara menjadi penting untuk dikembangkan agar potensi ekonomi pertahanan dapat tercapai.

Kata Kunci: Bandara, Ekonomi Pertahanan, Infrastruktur, Pelabuhan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 38

provinsi yang memiliki beragam bentuk geografis, tidak hanya terpisah oleh daratan tapi juga terpisah oleh lautan. Salah satu provinsi yang terpisah oleh

laut secara administratif adalah Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi geografis ini membuat Provinsi Kepulauan Riau sangat bergantung pada jalur transportasi laut dan udara untuk menghubungkan berbagai daerah pada provinsi tersebut.

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 00029' Lintang Selatan dan 04040' Lintang Utara, serta anatara 103022' Bujur Timur sampai dengan 10904' Bujur Timur, dengan total 1.800 Pulau, terdiri atas 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, diantaranya yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023).

Kabupaten Natuna yang terletak di wilayah Laut Natuna berbatasan langsung dengan negara tetangga yang area perairannya dikenal dengan Laut Cina Selatan. Lokasi tersebut menggambarkan bahwa perairan Provinsi Kepulauan Riau juga dilewati oleh jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), tepatnya pada ALKI I. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan jalur laut yang ditentukan menjadi jalur pelaksanaan hak navigasi di jalur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum maritim internasional. Saluran ini merupakan saluran maritim dan penerbangan, yang digunakan oleh kapal dan pesawat asing di laut untuk melakukan penerbangan dan navigasi normal yang damai (PRAMARIN, 2023). Lokasi dari ALKI ini menunjukkan besarnya pengembangan potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan pada daerah kepulauan atau pesisir dalam berbagai bidang. Adapun bidang-bidang yang dapat dikembangkan diantaranya yaitu bidang kemaritiman, bidang sosial dan budaya, bidang perindustrian pariwisata hingga bidang pertahanan.

Perkembangan sebuah kepulauan menjadi semakin kompleks karena perencanaan yang dilakukan dengan merumuskan kebijakan untuk membangun suatu wilayah kepulauan atau pulau-pulau yang terhubung, sekaligus mencapai efisiensi dan dampak eksponensial terhadap pulau-pulau lainnya (Taufiq, 2020). Menurut Ristiadi, ada dua bentuk pembangunan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kepulauan/ pesisir, yaitu pertama kegiatan pembangunan yang menyasar dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian antara kapasitas dan keadaan lingkungan juga sumber daya alamnya. Kedua, mengembangkan berdasarkan sumber daya nasional. Sumber daya nasional meliputi sumber daya material, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial, dan sumber daya buatan (Dirgantari & Barus, 2021)

Potensi pengembangan daerah kepulauan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pengembangan infrastruktur bandara dan pelabuhan merupakan sebuah cara yang tepat dalam pengembangan daerah kepulauan. Hal ini disebabkan bandara dan pelabuhan merupakan gerbang pintu masuk utama bagi daerah kepulauan. Pengembangan infrastruktur bandara dan pelabuhan menjadi salah satu pendorong bagi aktivitas perekonomian yang akan menjadi *multiplier effect* atas peningkatan aktivitas lainnya.

Pemanfaatan optimal atas potensi yang dimiliki suatu wilayah memerlukan pengembangan infrastruktur yang komprehensif dan strategis, dengan mempertimbangkan berbagai aspek potensial yang ada. Salah satu aspek yang layak menjadi pertimbangan dalam perencanaan infrastruktur adalah aspek ekonomi pertahanan. Peningkatan pertahanan

negara dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertahanan wilayah-wilayah di Indonesia salah satunya adalah dengan mengoptimalkan daerah pangkal perlawanan (LUBIS, 2021). Aspek ini menjadi sangat penting karena tidak hanya mengukur manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan potensi ancaman, baik yang bersifat tangible maupun intangible. Permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari infrastruktur bandara dan pelabuhan di Kepulauan Riau dapat mendukung sektor ekonomi dan memperkuat pertahanan di wilayah kepulauan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dilakukann dengan telaah kepustakaan atau *library research*. Peneliti mempelajari teori-teori dan literatur terkait dengan teori yang dibahas, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur daerah kepulauan. Penelitian kualitatif dengan telah kepustakaan sebaiknya dilakukan dengan asumsi metodologis, dimana penelitian sebaiknya digunakan secara induktif agar tidak mengarahkan pertanyaan yang diajukan peneliti. Salah satu alasan utama melakukan penelitian kualitatif dengan telah kepustakaan adalah sifatnya yang eksploratif (Ali et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa tinjauan pustaka merupakan suatu teknik untuk membuktikan atau memecahkan suatu permasalahan atau dapat dikatakan tinjauan pustaka merupakan suatu proses ilmiah yang menghasilkan hasil berupa laporan untuk melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan atau penelitian (Cahyono et al., 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan infrastruktur bandara dan pelabuhan sebagai pintu

gerbang masuk sebuah Kabupaten/Kota merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Berdasarkan perspektif ekonomi pertahanan, pengembangan bandara dan pelabuhan dapat membuka banyak potensi seperti peningkatan perdagangan dan pariwisata, namun juga membawa potensi ancaman, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, seperti risiko keamanan, penyelundupan, dan ancaman terhadap kedaulatan wilayah. Provinsi Kepulauan Riau terletak strategis di sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, yang merupakan jalur pelayaran internasional penting. Jalur ALKI I ini memberikan akses langsung ke berbagai daerah di setiap kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Dengan banyaknya pintu masuk dari jalur laut ini, Kepulauan Riau memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan arus perdagangan dan transportasi laut, baik domestik maupun internasional.



Gambar 1. ALKI I

Sumber: Diolah oleh Peneliti, Google Image 2024

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, bandara di Provinsi Kepulauan Riau terbagi ke dalam dua jenis hierarki, yaitu bandar udara pengumpul dan bandar udara pengumpan. Bandar udara pengumpul merupakan bandara yang memiliki cakupan layanan yang sangat luas, melayani penumpang dan kargo dalam jumlah besar. Layanan yang disediakan oleh bandara ini mencakup rute domestik maupun internasional. Selain itu, bandar udara pengumpul terbagi lagi menjadi tiga jenis berdasarkan skala layanannya, yaitu bandar udara

pengumpul skala layanan primer, sekunder, dan tersier. Bandar udara pengumpul skala layanan primer biasanya berlokasi di kota besar atau wilayah strategis dengan volume lalu lintas yang sangat tinggi. Sementara itu, bandar udara pengumpul skala sekunder dan tersier melayani daerah yang lebih kecil, namun tetap memiliki peran penting dalam konektivitas regional. Selain itu hierarki kedua bandara pengumpan, yang mana layanannya memiliki pengaruh dalam perkembangan ekonomi lokal, menjadi penjunjang dari bandara pengumpul serta sarana atau fasilitas penunjang pelayanan kegiatan lokal (Undang Undang No. 1 Tentang Penerbangan Dan PM.69 Tahun 2013 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, 2013).

Selanjutnya pintu masuk kedua yaitu pelabuhan yang ada dan sedang direncanakan dari hasil evaluasi (rasionalisasi) dan usulan rencana lokasi dan hierarki pelabuhan berjumlah 432 pelabuhan, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Bandara dan Pelabuhan di Provinsi Kepri

Kabupaten/ Kota	Bandara Udara Pengumpul	Bandara Udara Pengumpan	Pelabuhan (dalam jumlah)
Kepulauan Anambas	-	Letung Matak	77
Batam	Primer Hang Nadim		53
Bintan	Tersier New Bintan International Airport	Tambelan	34
Karimun	-	Raja Haji Abdullah	151
Lingga	-	Dabo Pulau Lingga	20
Natuna	Tersier Ranai	Subi Besar Pulau Laut Kelarik Serasan	63
Tanjungpinang g	Tersier Raja Haji Fisabilillah	-	34

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah infrastruktur bandara dan pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah kepulauan. Pertumbuhan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung perkembangan ekonomi, terutama dalam sektor pariwisata, perdagangan dan pertahanan. Selanjutnya berikut ini akan ditelaah lebih jauh, berdasarkan beberapa penelitian atau artikel terkait yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Infrastruktur Bandara Kabupaten Bintan dari Perspektif Ekonomi Pertahanan

Pesona Kabupaten Bintan telah menjadi sorotan pemerintah Indonesia, bahkan keindahannya menjadikan Bintan dianggap sebagai Bali kedua Indonesia. Menurut Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman), pada tahun 2023 Kabupaten Bintan menjadi pintu masuk Wisman dengan total 137.529 kunjungan (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023). Kabupaten Bintan memiliki setidaknya dua jalur pintu masuk, yaitu dari pelabuhan yang ada dan disiapkan adalah sejumlah 34 pelabuhan dan melalui bandara pengumpan yaitu bandar udara tambelan. Bandar udara tambelan terletak di Desa Kampung Melayu, Pulau Tambelan yang mana menjadi salah satu Pulau terluar Indonesia, yang bagian baratnya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Adapun fasilitas infrastruktur bandara ini telah selesai pada tahun 2019 dan akan terus dikembangkan, dengan landasan pacu seluas 1.200m x 30m dengan luas terminal 600m² (Febrinastri, 2020).

Dilihat dari segi ekonomi pertahanan, maka pembangunan bandara tambelan ini akan menjadi pemicu bagi masuknya wisman lebih

banyak. Infrastruktur yang baik akan menjadi sebuah pondasi yang kuat, dimana masuknya wisman akan menstimulus pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, dengan adanya berbagai aktivitas ekonomi baru yang muncul pada wilayah tersebut. Selain itu adanya bandara tersebut akan semakin mengkokohkan posisi negara Indonesia, terutama dari segi kemanaan udara, tentunya setiap pesawat yang akan mendarat atau melewati area tersebut akan memberikan informasi. Informasi tersebut akan bisa digunakan sebagai salah satu bentuk pertahanan negara, selain itu jika terjadi ketegangan militer di area Laut Cina Selatan, sangat dimungkinkannya landasan bandar udara teambelan digunakan bagi pertahanan negara.

2. Infrastruktur Pelabuhan Kabupaten Karimun dari Perspektif Ekonomi Pertahanan

Kabupaten Karimun, sebagai salah satu kabupaten dengan letak yang cukup strategis yaitu berada di perbatasan negara, langsung berada di *Malacca Strait* yang dilewati oleh berbagai kapal dari penjuru dunia. Dilihat dari segi jumlah pelabuhan yang ada dan akan diadakan adalah sebanyak 151 pelabuhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Berliana menunjukkan kegiatan aktivitas bongkar muat yang dilaksanakan di pelabuhan taman bunga direncanakan akan di relokasi ke pelabuhan parit rempak yang masuk kedalam kawasan free trade zone. Akan tetapi, belum bisa dilakukan karena tiga faktor, yang salah satunya di sebabkan oleh masih belum siapnya fasilitas infrastruktur yang dimiliki dalam aktivitas bongkar muat, sehingga relokasi belum dapat di laksanakan (Berliana & Adianto, 2022). Selanjutnya, pelabuhan bersekala internasional yang sedang gencar akan di bangun adalah pelabuhan bongkar muat di ujung Pulau Karimun Besar yaitu Pelabuhan Malarko.

Pelabuhan Malarko, merupakan sebuah pelabuhan bertaraf internasional yang disiapkan sebagai ruang gerak baru bagi aktivitas pelayaran internasional atau pelabuhan bongkar muat kegiatan ekspor-impor (Budiman & Kapiarsa, 2022).

Pelabuhan Malarko jika dilihat dari persepektif ekonomi pertahanan, maka akan menjadi salah satu bagian dari penggerak perekonomian daerah Kabupaten Karimun disebabkan adanya aktivitas perdagangan internasional. Infrastruktur yang dipersiapkan tentunya tidak hanya dari segi kesiapan pelabuhannya saja, akan tetapi juga jalan hingga ke bandara pengumpan yaitu bandar udara Raja Haji Abdullah. Dilihat dari ekonomi pertahanan yang akan timbul ialah semakin kuatnya posisi Indonesia terutama pada aktivitas perdagangan intrnasional yang selama ini masih menjadi isu strategis.

3. Infrastruktur Pelabuhan dan Bandara Kepulauan Anambas dari Perspektif Ekonomi Pertahanan

Kabupaten Kepulauan Anambas jika dilihat dari luas administratifnya hanya 1,3% lahan berupa daratan, sedangkan sisanya adalah lautan, memasuki musim angin utara dan selatan, ombak yang dihasilkan sangat tinggi, sehingga dibutuhkan bandara sebagai moda transportasi utama (University, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sahid, menunjukkan hasil bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk kedalam wilayah 3TP (tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan), dimana sering kali terjadi tindak pidana di wilayah laut, seperti pencurian ikan hingga pelanggaran wilayah, oleh sebab itu dibutuhkan asas penerapan *cabotage* agar memperbanyak kapal nasional yang berlayar di area tersebut (Sahid et al., 2019). Oleh sebab itu, kehadiran infrastruktur pelabuhan dan bandara yang baik akan berdampak signifikan

pada berbagai aspek kehidupan. Pengelolaan yang efisien tidak hanya akan mempercepat arus barang dan penumpang, yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga memperkuat pertahanan negara, karena mobilitas militer dan logistik nasional dapat berjalan lebih lancar dan terkoordinasi dengan baik. Sulitnya pasokan barang akibat tingginya ombak seringkali menyebabkan harga barang di wilayah tersebut menjadi mahal. Kondisi cuaca yang ekstrem membuat distribusi barang melalui jalur laut terhambat, sehingga pasokan tidak stabil dan harga barang meningkat. Namun, jika bandara pengumpulan dipersiapkan dengan baik, jalur distribusi udara dapat menjadi alternatif yang lebih andal, sehingga mampu menekan harga-harga barang. Selain itu, dengan adanya pengembangan pelabuhan yang baik, kapal-kapal nasional akan dapat bersandar di setiap titik strategis. Hal ini tidak hanya memperkuat distribusi barang, tetapi juga memperkuat pertahanan negara di wilayah kepulauan, karena akses dan mobilitas kapal militer serta logistik menjadi lebih mudah.

4. Infrastruktur Bandara Kabupaten Lingga dari Perspektif Ekonomi Pertahanan

Kabupaten Lingga, menjadi salah satu kabupaten di daerah Kepulauan Riau yang memiliki lokasi yang cukup aman, jika dilihat dari lokasi pertahanan negara, hal ini disebabkan lokasi Kabupaten ini tidak berhadapan langsung dengan negara asing atau perairan internasional. Akan tetapi, walaupun aman dari segi lokasi, Kabupaten ini tetap membutuhkan akses dari segi fasilitas pelabuhan dan bandara yang harus memadai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pragista, menunjukkan bahwa Kabupaten Lingga

memiliki salah satu akses yaitu bandar udara pengumpulan, yaitu bandar udara Dabo. Penelitian ini menghasilkan data, dimana bandar udara Dabo, masih belum memiliki fasilitas infrastruktur yang memadai, dapat dilihat dari jalan akses yang belum memenuhi standar, yaitu jalur akses yang lebarnya 3,5 meter kurang dari jalur seharusnya, serta belum memiliki bahu jalan (Pragista et al., 2022). Oleh sebab itu, infrastruktur bandara harus menjadi perhatian, karena menjadi salah satu akses atau pintu masuk masyarakat lokal. Dari persepektif ekonomi pertahanan, melihat kondisi yang cukup aman, maka pemerintah bisa memperluas bandara atau membangun area khusus untuk industri pertahanan di Kabupaten ini, dengan memanfaatkan lokasi sebagai wilayah penyimpanan alat-alat pertahanan negara. Apabila sewaktu-waktu dalam keadaan darurat di wilayah Laut Cina Selatan, maka alat pertahanan bisa cepat digunakan. Hadirnya industri pertahanan, akan turut mendorong aktivitas perekonomian masyarakat lokal (*multiplier effect*).

5. Infrastruktur Pelabuhan dan Bandara Kabupaten Natuna dari Perspektif Ekonomi Pertahanan

Kabupaten Natuna berlokasi langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan, dimana wilayah perairannya sering menjadi area ketegangan pertahanan nasional. Kekayaan alam laut yang melimpah, menjadikan lokasi perairan natuna sering menjadi lokasi pencurian hasil komoditas perikanan. Pembangunan infrastruktur pelabuhan dan bandara yang bertaraf nasional hingga internasional sangat dibutuhkan terutama dalam menjaga wilayah perairan laut natuna. Dari sisi perekonomian daerah, permasalahan perbatasan negara di Kabupaten Natuna saat ini antara lain angka kemiskinan

mencapai 4,3%; tingkat Gini 0,34%; Indeks Pembangunan Manusia 71,23; biaya transportasi udara yang tinggi; dan terbatasnya transportasi untuk mendistribusikan kebutuhan pokok (Yudha & Dina, 2020). Permasalahan tersebut menjadikan harga barang pokok di Kabupaten Natuna menjadi sangat tinggi, ditambah dengan keamanan kawasan perairan Natuna yang menjadikan masyarakat lokal tidak bisa melakukan aktivitas perikanan dengan leluasa. Selain itu, ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Suwarno dalam penelitiannya, yang salah satunya adalah dengan menganalisis ancaman yang tersebar di area kawasan laut Natuna melalui berbagai aktivitas ilegal berupa illegal fishing, penyelundupan, perdagangan narkoba serta keberadaan dan aktivitas kapal asing seperti kapal penjaga pantai Tiongkok dan kapal resmi Vietnam di wilayah Natuna, upaya-upaya yang diperlukan harus terus dilakukan, karena dalam skala yang lebih besar akan menimbulkan ancaman terhadap hak-hak nasional negara tuan rumah (Indonesia) (Suwarno et al., 2021). Dilihat dari perspektif ekonomi pertahanan, maka sangat dibutuhkannya infrastruktur pelabuhan dan bandara yang memadai, dimana bandara dapat menjadi alat transportasi dalam pengiriman pasokan kebutuhan sehari-hari hingga dapat menekan harga-harga dan pelabuhan bisa menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan. Bersandarnya kapal nelayan pada pelabuhan akan menjadi salah satu bentuk lain dari garda terdepan bagi pertahanan negara.

6. Infrastruktur Pelabuhan dan Bandara Kota Batam dari perspektif Ekonomi Pertahanan

Kota Batam, telah menjadi ikon dari negara Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Singapura, bahkan lokasinya sangat

dekat, yaitu hanya berjarak beberapa kilo meter dari bibir pantai Kota Batam. Peluang ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Kota Batam, akan tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Purba, menunjukkan hasil bahwa dalam beberapa tahun kebelakang, aktivitas perekonomian Kota Batam mengalami penurunan pada sektor investasi asing, yang salah satunya disebabkan karena kelemahan dari kemampuan persaingan kompetitif pada infrastruktur pelabuhan dan listrik yang tidak memadai (Purba & Saputra, 2018). Lebih jauh lagi, Kota Batam berdasarkan data BPS tahun 2023, menunjukkan jumlah kunjungan Wisman yang masuk ke Kota Batam pada akhir desember tahun 2022 telah mencapai angka 188.544 kunjungan. Hal ini menunjukkan Kota Batam cukup memiliki pesona bagi wisatawan asing. Pesona ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah Kota Batam, seperti dengan meningkatkan fasilitas infrastruktur untuk pariwisata. Sedangkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah, fasilitas infrastruktur penunjang sektor pariwisata yang ada di bandara internasional Hang Nadim belum terkoordinasi dengan baik, antara pemerintah (dinas pariwisata) dengan pengelola bandara (Fauziah & Aritonang, 2023). Hal ini tentunya hal ini sangat di rasa kurang baik, dimana seharusnya Kota Batam dapat menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan multiplier effect bagi kabupaten/kota lainnya, namun belum mampu dimanfaatkan dengan baik disebabkan infrastruktur pelabuhan belum dapat bekerja secara maksimal dan juga bandara internasional yang belum memiliki fasilitas penunjang untuk pariwisata. Dilihat dari perspektif ekonomi pertahanan lokasi Kota Batam seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal, jika dilihat dari aktivitas perekonomian yang diperoleh dari

investasi asing, dimana jika semakin tinggi investasi asing yang masuk maka akan semakin aman pula Kota Batam dari ancaman dalam bentuk fisik. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyaknya kepentingan negara-negara lain terhadap aktivitas investasi asing di wilayah Kota Batam, seperti contoh tempat berlabuhnya kapal asing di pelabuhan Kota Batam.

7. Infrastruktur Pelabuhan Kota Tanjungpinang dari perspektif Ekonomi Pertahanan

Kota Tanjungpinang menjadi Kota Administratif bagi Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini dikenal pula dengan kekhasan suku Melayu yang sangat kental, yang menjadikan bangsa melayu menjadi ikon dari Kota ini. Pulau Penyengat adalah Pulau yang jalur pintu masuknya melalui sebuah pelabuhan yang berhadapan langsung dengan Pelabuhan Sri Bintan Pura kota Tanjungpinang. Pulau penyengat menjadi pusat perkembangan sejarah islam dan budaya melayu di Provinsi Kepulauan Riau. Peninggalan budaya pada suatu daerah dapat memperkuat perekonomian masyarakat lokal sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masjid Agung Sultan Riau merupakan bagian dari ibukota pengembangan ekonomi masyarakat Pulau Penyengat. Masjid ini memiliki nilai Sejarah yaitu dikatakan terbuat dari putih telur dan memiliki nilai budaya melayu sehingga menarik wisatawan untuk berwisata religi. Selain itu, letak Singapura yang berdekatan dan strategis dapat menambah nilai pariwisata Pulau Penyengat (Damai, 2015). Dilihat dari persepektif ekonomi pertahanan, maka fasilitas infrastruktur pelabuhan Pulau Penyengat harus ditingkatkan hingga bertaraf internasional, hal ini akan menjadikan kunjungan ke Pulau ini semakin meningkat, karena wisatawan asing yang berasal dari berbagai negara

dapat langsung mengunjungi pulau ini langsung dari pelabuhan Singapura. Masuknya Wisman secara langsung, tentunya akan lebih meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, selanjutnya pertahanan negara dalam mempertahankan adat melayu yang dimiliki akan semakin kuat, dimana dapat mencegah klaim budaya yang selalu dilakukan oleh Malaysia.

SIMPULAN

Provinsi Kepulauan Riau yang kabupaten/ kotanya terpisah oleh lautan dan berbagai pulau-pulau akan sangat bergantung dengan adanya kesiapan dari infrastruktur bandara dan pelabuhan, agar terjadinya konektivitas antar daerah kepulauan. Dilihat dari persepektif ekonomi pertahanan dengan adanya pengembangan infrastruktur pelabuhan dan bandara memberikan berbagai peluang baru dan mengatasi ancaman sekaligus. Adapun pengembangan fasilitas bandara dan atau pelabuhan di setiap kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berbeda sesuai dengan lokasi wilayahnya yang tersebar dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan. Adapun tujuh kabupaten/ kota Provinsi Kepulauan Riau yaitu, Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Kepulauan Anambas, Natuna serta Kota Tanjungpinang dan Batam, dengan memiliki infrastruktur bandara dan pelabuhan yang baik maka dapat memberikan kontribusi bagi ekonomi pertahanan negara. Peluang dalam persepektif ekonomi pertahanan yang dapat ditangkap dengan adanya infrastruktur bandara yang baik diantaranya yaitu; bandara yang ada dapat dimanfaatkan bagi masuknya Warga Negara Asing (WNA) untuk berwisata, yang tentunya dengan masuknya WNA, sedikitnya memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian daerah. Bandar udara juga dapat dimungkinkan bagi

pendaratan pesawat militer dalam keadaan darurat apabila adanya ketegangan di area Laut Cina Selatan, yang sampai saat ini masih menjadi isu politik untuk perairan internasional. Bandar udara juga membantu penyebaran barang atau pengiriman pasokan ke wilayah 3TP dengan lebih mudah, dimana jika kondisi laut sedang tidak baik, maka bandara akan menjadi solusi terbaik. Selanjutnya, dilihat dari persepektif ekonomi pertahanan dengan adanya pelabuhan juga menjadi keunggulan tersendiri bagi daerah kepulauan. Bersandarnya kapal-kapal nelayan di beberapa titik di daerah perbatasan akan membantu menjaga daerah kedaulatan negara Republik Indonesia. Pelabuhan juga membantu percepatan bagi beberapa daerah dalam aktivitas bongkar-muat barang, khususnya daerah pada aktivitas ekspor-impor, maka pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya menjadi pintu masuk pertama tapi juga menjadi penyaring pertama jika ada ancaman dalam bentuk barang berbahaya. Oleh karena itu, fasilitas infrastruktur bandara dan pelabuhan daerah kepulauan yang ada dan sedang dipersiapkan harus benar-benar dimaksimalkan, serta harus berstandar nasional dan internasional sehingga dapat memperoleh potensi ekonomi pertahanan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., Sastrodiharjo, I., Saputra, F., Besar, G., Ekonomi, F., Bisnis, D., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2022). Pengukuran Organizational Citizenship Behavior: Beban Kerja, Budaya Kerja dan Motivasi (Studi Literature Review). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1).
- Berliana, V., & Adianto, A. (2022). Peran Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pelabuhan Bongkar Muat di Kawasan Free Trade Zone Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(2). <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.484-494>
- BPS Provinsi Kepulauan Riau (Ed.). (2023). Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2023. In *Badan Pusat Statistik*. BPS Provinsi Kepulauan Riau.
- Budiman, D., & Kapiarsa, A. B. (2022). Ketahanan Wilayah Kabupaten Karimun Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3). <https://doi.org/10.22146/jkn.70040>
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*.
- Damai, A. H. (2015). Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Sultan Riau Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Pulau Penyengat. *Academia.Edu*.
- Dirgantari, W., & Barus, L. S. (2021). Inovasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kepulauan Maritim Di Maluku Utara (Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan). *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, Wp I*.
- Fauziah, S., & Aritonang, Y. F. (2023). Analisis Fasilitas Penunjang Sektor Pariwisata di Bandara Internasional Hang Nadim Batam. *Flight Attendant Kedirgantaraan: Jurnal Public Relation, Pelayanan, Pariwisata*, 5(01), 57–68.
- Febrinastri, F. (2020). *Dukung Wisata Pantai, Bandara Tambelan di Bintan Segera Beroperasi*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2020/08/27/10000/dukung-wisata-pantai-bandara-tambelan-di-bintan-segera-beroperasi>
- LUBIS, D. R. A. F. (2021). *Studi Perencanaan Wilayah Pertahanan Dalam Tinjauan Antropologi Hukum (Kesiapan Perwira Hukum TNI AD Melaksanakan Tugas Dukungan Hukum)*. Penerbit Qiara Media.
- Pragista, A. G., Wasito, B., & Suryono, W. (2022). Perencanaan Pelebaran Jalan Akses Unit PKP-PK di Bandar Udara Dabo Singkep. *Prosiding SNITP (Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan)*, 6(1).
- PRAMARIN. (2023). *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*. <https://pramarin.or.id/alur-laut-kepulauan-indonesia-alki>
- Purba, D., & Saputra, A. (2018). Faktor

Dominan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Batam. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 1, 37-42.

Sahid, A., Hamid, E. S., & Armawi, A. (2019). Dampak Implementasi Asas Cabotage dan Program Tol Laut Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2).
<https://doi.org/10.22146/jkn.47766>

Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Bahar, F. (2021). Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1).
<https://doi.org/10.22146/jkn.62028>

Taufiq, M. (2020). Pemindahan ibu kota dan potensi konektivitas pemerataan ekonomi. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 8(1), 3.

Undang Undang No. 1 Tentang Penerbangan dan PM.69 Tahun 2013 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional, Pub. L. No. 01, Direktorat Jendral Perhubungan (2013).
https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/PM_69_Tahun_2013_Tatanan_Kebandarudaraan_Nasional.pdf

University, S. C. (2017). *Kepaulauan Anambas Butuh Bandara dan Pelabuhan Laut Yang Representatif*.
<https://www.unika.ac.id/news/media-massa/online/kepaulauan-anambas-butuh-bandara-dan-pelabuhan-laut-yang-representatif/>

Yudha, E. P., & Dina, R. A. (2020). Pengembangan potensi wilayah kawasan perbatasan negara Indonesia (studi sasus: Ranai-Natuna). *Tataloka*, 22(3).